

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan PDRB Setiap Sub-sektor Pertanian dan Kemiskinan

5.1.1 Perkembangan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan

Perkembangan sub sektor PDRB sub sektor tanaman pangan untuk 10 provinsi di pulau Sumatera selama periode tahun 2018-2023 yang menggambarkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari sektor Tanaman Pangan provinsi di Pulau Sumatera selama 6 tahun. Rata-rata perkembangan PDRB Tanaman Pangan di seluruh provinsi yang diamati selama periode 2018-2023 yaitu dimulai sebesar -5,86% di provinsi Kep. Riau dan rata-rata PDRB tertinggi 4,14% di provinsi Bengkulu, ini menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam ketergantungan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera terhadap sektor tanaman pangan. Tren penurunan kontribusi PDRB ADHB Tanaman Pangan di sebagian besar provinsi secara historis tidak terlalu bergantung pada tanaman pangan karena dominasi sektor lain (migas, pertambangan timah, industri, pariwisata), hal ini berarti terjadi pertumbuhan yang lebih cepat di sektor-sektor non-pertanian, seperti industri manufaktur, jasa, perdagangan, atau sektor primer lainnya (misalnya perkebunan besar atau pertambangan).

Lebih lanjut analisis perkembangan PDRB sub sektor tanaman pangan selama 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Data PDRB ADHB dan Perkembangan Tanaman Pangan Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Milliar Rupiah dan Persentase)

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%
NAD	10.246,38	-	9.909,06	-3,29	10.143,97	2,37	8.563,84	-15,57	8.248,38	-3,68	8.487,65	2,90	-3,45
SUMUT	27.082,76	-	28.367,91	4,74	28.607,84	0,84	27.838,40	-2,68	29.442,17	5,76	32.382,18	9,98	3,73
SUMBAR	15.393,72	-	15.824,96	2,80	15.397,18	-2,7	13.247,57	-13,96	14.249,95	7,56	16.236,96	13,94	1,53
RIAU	6.492,90	-	6.412,14	-1,24	6.727,43	4,91	6.205,81	-7,75	6.200,83	-0,08	6.152,29	-0,78	-0,99
JAMBI	4.585,51	-	4.287,60	-6,49	4.466,10	4,16	3.871	-13,32	3.757,80	-2,92	3.935,30	4,72	-2,77
SUMSEL	11.155,50	-	11.452,10	2,65	11.702	2,18	10.738,70	-8,23	11.381,47	5,98	12.111,59	6,41	1,80
BENGKULU	6.040,07	-	6.365,84	5,39	6.330,19	-0,56	6.249,30	-1,27	6.964,22	11,44	7.361,56	5,70	4,14
LAMPUNG	36.910,93	-	36.398,20	-1,38	38.399,86	5,49	34.823,92	-9,31	37.347,75	7,24	38.815,08	3,92	1,19
BABEL	377,28	-	434,11	15,06	525,55	21,06	464,66	-11,58	475,99	2,43	425,50	-10,60	3,27
KEPRI	28,48	-	27,23	-4,38	23,72	-12,89	18,24	-23,10	19,93	9,26	20,29	1,80	-5,86
Rata-rata Sumatera		-		1,39		2,486		-10,68		4,30		3,80	0,26

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan analisis per provinsi dengan urutan perkembangan tertinggi PDRB sub sektor tanaman pangan di tahun 2019 yaitu ada provinsi Kep.Bangka Belitung 15,06%, Bengkulu 5,39%, Sumatera Utara 4,74%, Sumatera Barat 2,80%, Sumatera Selatan 2,65% dibanding dengan rata-rata perkembangan Sumatera lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 1,39%, perkembangan yang tinggi tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama didorong oleh kenaikan harga jual komoditas pangan utama seperti harga gabah dan jagung di pasar, kedua terjadinya peningkatan luas panen atau peningkatan produktivitas yang signifikan di provinsi-provinsi tersebut, ketiga adanya program pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan produksi. Provinsi yang mengalami penurunan perkembangan yaitu Jambi -6,49%, Kep.Riau -4,38, Aceh -3,29%, Lampung -3,38, Riau -1,24% lebih besar dari rata-rata perkembangan Sumatera yaitu 1,39%%. Penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, iklim musim kemarau panjang yang lama dan terjadi di Sumatera bagian tengah dan selatan sehingga mengganggu masa tanam dan panen, kedua karena serangan hama atau penyakit pada tanaman pangan, ketiga terjadi konversi lahan pertanian pangan ke komoditas perkebunan yang lebih menguntungkan seperti sawit sehingga volume produksi pangan menurun.

Pada tahun 2020 provinsi dengan urutan perkembangan tertinggi ada di provinsi Kep.Bangka Belitung 21,06%, Lampung 5,49%, Riau 4,91%, lebih kecil dari rata-rata Sumatera dan dilanjut provinsi yang dibawah rata-rata perkembangan Sumatera tahun 2020 ada Jambi 4,16%, Aceh 2,37%, Sumatera Selatan 2,18%, Sumatera Utara 0,84 lebih besar dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 2,48%. Perkembangan yang tinggi tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, tahun 2020 adalah awal pandemi covid 19 dimana ketahanan pangan menjadi prioritas dan permintaan domestik melonjak, peningkatan ini mendorong lonjakan harga pangan sebagai repons terhadap gangguan rantai pasok, kedua karena provinsi dengan kenaikan termasuk Jambi dan Aaceh memungkinkan memanen hasil produksi yang terbaik ditengah cuaca yang mendukung. Provinsi yang di bawah rata-rata perkembangan Sumatera pada tahun 2020 ada provinsi Kep.Riau -12,89%, Sumatera Barat -2,7%, Bengkulu -0,56%. Setiap provinsi

mengalami penurunan perkembangan pada tahun 2021 provinsi yang paling tinggi penurunannya ada Kep.Riau -23,10%, Sumatera Barat 13,96%, Jambi 13,32 dan dilanjut dengan provinsi lain yang lebih kecil rata-rata perkembangan Sumatera - 10,68%. Terjadinya penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, Kep.Riau memiliki penurunan yang drastis hal ini konsisten dengan fakta bahwa Kep.Riau bukanlah lumbung pangan, kontribusi pangan sangat kecil sehingga sedikit gangguan panen dapat menyebabkan fluktuasi persentase yang sangat besar, penyebab kedua karena dilihat Sumatera Barat mengalami gangguan panen akibat bencana alam bahkan pergeseran harga komoditas yang kurang menguntungkan.

Perkembangan PDRB sub sektor tanaman pangan pada tahun 2022 dengan urutan tertinggi yaitu Bengkulu 11,44%, Kep.Riau 9,26%, Sumatera Barat 7,56%, Lampung 7,24%, Sumatera Selatan 5,98, Sumatera Utara 5,76% lebih kecil dari rata-rata Sumatera yaitu 4,30%, perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, di tahun 2022 ialah tahun pemulihan pasca pandemi permintaan pangan domestik pulih dan harga pupuk dan benih sudah kembali stabil, kedua karena peningkatan tertinggi di Bengkulu dan Sumatera Barat menunjukkan keberhasilan musim panen atau peningkatan harga komoditas pangan yang signifikan, ketiga Kep.Riau mengalami kenaikan yang merupakan koreksi positif setelah penurunan di tahun 2021. Beberapa provinsi dengan nilai dibawah rata-rata Sumatera yaitu Aceh -3,68%, Jambi -2,92%, Riau -0,08, dan Kep.Bangka Belitung 2,43%. Penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan di Aceh dan Jambi meskipun tren pemulihan umum penurunan di Aceh dan Jambi disebabkan oleh iklim lokal terjadi kekeringan atau banjir yang mengganggu panen di beberapa sentra produksi utama.

Perkembangan PDRB sub sektor tanaman pangan pada tahun 2023 dengan nilai tertinggi ada provinsi Sumatera Barat 13,94%, Sumatera Utara 9,78%, Sumatera Selatan 6,41%, Bengkulu 5,70%, Jambi 4,72% dan Lampung 3,92% lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera, perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, karena peningkatan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara memungkinkan besar didorong oleh kebijakan harga pangan

yang menguntungkan petani, kedua karena efek El nino yang belum terlalu parah di awal tahun sehingga panen masih bagus serta kenaikan harga pasar global yang mendorong harga domestik. Beberapa provinsi dibawah rata-rata perkembangan Sumatera yaitu Aceh 2,90%, Kep.Riau 1,80%, Kep.Bangka.Belitung -10,60%, dan Riau-0,78. Penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pangan ke komoditas unggulan seperti timah atau perkebunan dan dampak cuaca buruk yang sangat lokal

Secara umum rata-rata perkembangan yang tertinggi dalam 6 tahun ada di Provinsi Bengkulu dengan perkembangan 4,14% lebih kecil dari rata-rata Sumatera 6 tahun sebesar 0,26%, provinsi dengan rata-rata perkembangan terendah atau menurun yaitu Kep.Riau -5,86% lebih besar dari rata-rata Sumatera sebesar 0,26%. Secara luas dapat diamati bahwa perkembangan PDRB ADHB Tanaman Pangan di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di mana sektor lain (seperti industri pengolahan, jasa, atau pertambangan) yang mengalami pertumbuhan yang lebih pesat, atau sektor tanaman pangan itu sendiri mengalami perlambatan pertumbuhan relatif. Penurunan ini juga bisa mencerminkan diversifikasi ekonomi yang sedang berlangsung di berbagai provinsi. Tantangan sub sektor Tanaman Pangan dalam penurunan persentase ini tidak selalu berarti penurunan produksi absolut, tetapi bisa juga menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman pangan tidak secepat pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: alih fungsi lahan, perubahan iklim, keterbatasan teknologi dan modal, generasi petani. Kenaikan PDRB Tanaman Pangan dilihat dari beberapa faktor yaitu kenaikan harga, harga jual komoditas tanaman pangan di pasar yang sedang tinggi, sehingga nilai ekonomi dari produksi meningkat dan dukungan kebijakan, intervensi pemerintah (subsidi, irigasi, harga dasar) yang efektif mendorong petani.

5.1.2 Perkembangan PDRB Sub Sektor Hortikultura

Perkembangan PDRB sub sektor hortikultura untuk 10 provinsi di pulau Sumatera selama periode tahun 2018-2023 yang menggambarkan perkembangan persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari subsektor Hortikultura dari masing-masing provinsi di Pulau Sumatera selama 6 tahun. Data ini penting untuk memahami seberapa besar Persentase hortikultura dalam perekonomian provinsi. Secara umum perkembangan PDRB ADHB Hortikultura di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan pola yang cenderung stabil atau sedikit menurun selama 6 tahun, hanya beberapa provinsi yang menunjukkan fluktuasi yang lebih jelas, namun secara keseluruhan tidak ada lonjakan atau penurunan drastis yang konsisten di semua provinsi, berbeda dengan tren penurunan yang lebih jelas pada tanaman pangan, menunjukkan bahwa subsektor hortikultura memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan tanaman pangan, disebabkan karena karakteristik produknya (nilai jual lebih tinggi, siklus tanam lebih pendek, pasar yang lebih spesifik).

Perkembangan PDRB Hortikultura di seluruh provinsi yang menunjukkan perbedaan struktur ekonomi dan potensi pertanian antar provinsi, seperti tanaman pangan yang hampir selalu menunjukkan penurunan di sebagian besar provinsi, PDRB sub sektor hortikultura menunjukkan pola yang lebih bervariasi. Lebih lanjut dapat dilihat Perkembangan PDRB sub sektor Hortikultura pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Data PDRB ADHB dan Perkembangan Hortikultura Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023
(Milliar Rupiah dan Persentase)

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%
NAD	6.466	-	6.940,10	7,33	7.482,32	7,81	7.982,11	6,68	8.997,84	12,73	9.321,61	3,60	7,63
SUMUT	15.730,99	-	16.187,13	2,90	16.861,75	4,17	17.806,18	5,60	19.484,30	9,42	20.551,56	5,48	5,51
SUMBAR	6.777,63	-	6.864,20	1,28	7.220,23	5,19	7.568,65	4,83	8.053,29	6,40	8.359,19	3,80	4,30
RIAU	4.306,69	-	4.579,24	6,33	4.584,77	0,12	4.686,92	2,23	4.957,13	5,77	5.201,08	4,92	3,87
JAMBI	7.068,37	-	5.166,10	-26,91	5.295,40	2,50	5.512,30	4,10	6.152,70	11,62	6.532,50	6,17	-0,50
SUMSEL	3.840	-	4.334,10	12,87	4.799,30	10,73	5.111,40	6,50	5.474,25	7,10	5.718,40	4,46	8,33
BENGKULU	2.443,21	-	2.588,74	5,96	2.638,95	1,94	2.807,64	6,39	2.944,05	4,86	3.202,59	8,78	5,59
LAMPUNG	5.702,33	-	5.864,27	2,84	5.163,45	-11,95	5.396,22	4,51	5.768,90	6,91	6.056,46	4,98	1,46
BABEL	1.357,01	-	1.403,59	3,43	1.595,69	13,69	1.555,30	-2,53	1.662,71	6,91	1.841,99	10,78	6,46
KEPRI	334,87	-	403,98	20,64	420,83	4,17	411,99	-2,10	420,89	2,16	466,55	10,85	7,14
Rata-rata Sumatera		-		3,67		3,837		3,62		7,39		6,38	4,98

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat disimpulkan analisis per provinsi dengan perkembangan yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu provinsi Kep.Riau 20,64%, Sumatera Selatan 12,87%, Aceh 7,33%, Riau 6,33%, Bengkulu 5,96% perkembangan tersebut lebih kecil dari perkembangan Sumatera tahun 2019 sebesar 3,67%, perkembangan kenaikan sangat tinggi Kep.Riau kenaikan ini yang ekstrem menunjukkan bahwa basis PDRB sangat kecil, sedikit peningkatan volume panen sangat berpengaruh dan kenaikan harga jual akibat gangguan pasokan dari provinsi lain bisa menyebabkan persentase yang melonjak, kenaikan kuat lainnya karena didorong oleh musim panen yang berhasil dan peningkatan permintaan domestik yang stabil yang menguntungkan petani. Provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata Sumatera yaitu Kep.Bangka.Belitung 3,43%, Sumatera Utara 2,90%, Lampung 2,84% dan Provinsi yang mengalami penurunan ialah provinsi Jambi - 26,91%. Penurunan perkembangan tersebut sangat drastis yang disebabkan oleh gagal panen massal akibat bencana iklim dan serangan hama penyakit yang luas yang merusak hasil produksi. Beberapa provinsi dengan perkembangan PDRB hortikultura tertinggi pada tahun 2020 yaitu provinsi Kep.Bangka Belitung 13,69%, Sumatera Selatan 10,73%, Aceh 7,81%, Sumatera Barat 5,19%, Sumatera Utara 4,17% dan Kep.Riau 4,17% yang lebih kecil perkembangan Sumatera sebesar 3,83%, perkembangan yang tertinggi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu: adanya lonjakan harga komoditas hortikultura seperti rempah-rempah atau sayuran karena gangguan logistik dan upaa masyarakat untuk meningkatkan imun saat adanya pandemi covid 19. Beberapa provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata perkembangan Sumatera yaitu Jambi 2,50%, Bengkulu 1,94%, Riau 0,12%, dan provinsi yang mengalami penurunan perkembangan provinsi Lampung - 11,95%. Penurunana tersebut disebabkan oleh adanya gangguan rantai pasok dan pemasaran yang parah akibat pembatasan pergerakan (PSBB/PPKM) di awal pandemi.

Perkembangan PDRB hortikultura tahun 2021 dengan perkembangan tertinggi dari rata-rata Sumatera sebesar 3,62% yaitu provinsi Aceh 6,68%, Sumatera Selatan 6,50%, Bengkulu 6,39%, Sumatera Utara 5,60%, Sumatera Barat

4,83%, Lampung 4,51%, Jambi 4,10%, perkembangan tertinggi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya pemulihan dan adaptasi di sub sektor pertanian hortikultura terhadap kondisi pandemi dan harga komoditas hortikultura cenderung stabil karena permintaan lokal yang konsisten. Provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata perkembangan Sumatera yaitu provinsi Riau 2,23% dan provinsi yang mengalami penurunan perkembangan yaitu Kep.Riau -2,10% dan Kep.Bangka Belitung -2,53%. Penurunan tersebut disebabkan oleh gangguan logistik dan cuaca yang lokal, karena hortikultura sangat terhadap kerusakan dan butuh transportasi cepat, pembatasan pergerakan pada masa pandemi memungkinkan memengaruhi pemasaran masyarakat. Pada tahun 2022 perkembangan yang tertinggi di provinsi Aceh 12,73%, Jambi 11,62%, Sumatera Utara 9,42% lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera 7,39%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertama adanya kenaikan harga yang kuat, tahun 2022 pemulihan ekonomi penuh, kenaikan tinggi di Aceh, Jambi, dan Sumatera Utara menunjukkan kenaikan permintaan pasar yang kuat, kondisi iklim yang mendukung panen dan peningkatan investasi dalam sub sektor hortikultura.

Provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata Sumatera yaitu Sumatera Selatan 7,10%, Lampung dan Kep.Bangka Belitung 6,91%, Sumatera Barat 6,40%, Riau 5,77%, Bengkulu 4,86% dan provinsi dengan perkembangan terendah ialah Kep.Riau 2,16% dibandingkan dengan rata-rata perkembangan Sumatera 7,39%. Kenaikan terendah Kep.Riau meskipun positif kenaikan Kep.Riau hanya 2,16% menunjukkan bahwa berbeda dengan provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Kep.Riau tidak menikmati lonjakan harga seperti provinsi lain. Perkembangan PDRB sub sektor hortikultura tertinggi pada tahun 2023 ialah provinsi Kep.Riau 10,85%, Kep.Bangka Belitung 10,78%, Bengkulu 8,78% dengan rata-rata perkembangan Sumatera 6,38% lebih kecil dari perkembangan rata-rata Sumatera, perkembangan tertinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan harga jual yang signifikan untuk komoditas tertentu di pasar lokal, harga stabil dan produktivitas yang terjaga. Beberapa provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata Sumatera yaitu Jambi 6,17%, Lampung 4,98%, Riau 4,92%, Sumatera Selatan 4,46%, Sumatera Barat

3,80%, dan Aceh 3,60%, kenaikan lebih rendah ini diakibatkan oleh panen yang kurang optimal karena cuaca dan adanya penurunan harga jual untuk komoditas hortikultura utama dibanding dengan tahun 2022.

Analisis perkembangan selama 6 tahun provinsi dengan rata-rata perkembangan PDRB sub sektor hortikultura yang tertinggi ialah provinsi Sumatera Selatan 8,33% dan perkembangan provinsi yang mengalami penurunan rata-rata perkembangan ialah Jambi sebesar -0,50% lebih kecil dari rata-rata Sumatera 4,98%. Perkembangan PDRB hortikultura cenderung rendah atau menurun, ini menunjukkan bahwa hortikultura masih menjadi sektor sekunder dalam struktur PDRB wilayah tersebut, dengan pertumbuhan PDRB yang lebih banyak disumbang oleh sektor-sektor dominan tersebut. Penurunan perkembangan di beberapa provinsi, meskipun sedikit, bisa jadi menunjukkan adanya alih fungsi lahan dari pertanian (termasuk hortikultura) ke permukiman, industri, atau perkebunan monokultur lain yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek.

Tantangan Perubahan iklim, kurangnya investasi dalam teknologi pertanian modern, akses pasar yang terbatas, dan persaingan dengan komoditas lain adalah tantangan umum. Potensi peningkatan nilai tambah melalui pengolahan (hilirisasi), pengembangan agrowisata, dan peningkatan efisiensi produksi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kontribusi hortikultura. Kebutuhan akan pangan yang beragam dan berkualitas juga terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung subsektor hortikultura, baik melalui subsidi bibit, pendampingan teknis, pembangunan infrastruktur (irigasi, jalan desa), maupun fasilitasi akses pasar, akan sangat menentukan perkembangan sektor ini di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun subsektor hortikultura di Pulau Sumatera belum menunjukkan perkembangan yang masif secara persentase PDRB, stabilitas di beberapa provinsi menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya tahan dan menjadi penyangga ekonomi penting di tingkat lokal, terutama bagi petani skala kecil dan menengah.

5.1.3 Perkembangan PDRB Sub Sektor Perkebunan

Secara umum perkembangan PDRB ADHB sub sektor Perkebunan di Pulau Sumatera menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan signifikan di sebagian besar provinsi selama periode 2018-2023. Beberapa provinsi bahkan memiliki perkembangan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 10% dari total PDRB, hal ini menegaskan bahwa sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet adalah tulang punggung perekonomian utama di banyak wilayah di Sumatera. Peningkatan ini bisa didorong oleh ekspansi lahan, peningkatan produktivitas, atau kenaikan harga komoditas global. Rata-rata perkembangan PDRB sub sektor Perkebunan di seluruh provinsi yang diamati selama periode 2018-2023 dimulai dari perkembangan terendah sebesar 3,80% yaitu Sumatera Barat dan tertinggi 17,44% yaitu Aceh, hal ini mencerminkan perbedaan dalam luas lahan perkebunan, jenis komoditas utama, dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor ini. Sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, adalah pilar utama perekonomian di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera. Peningkatan PDRB ini mengkonfirmasi peran sentralnya dalam menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Analisis lebih lanjut dapat dilihat tabel 5.3.

**Tabel 5.3 Data PDRB ADHB Perkembangan Perkebunan Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023
(Milliar Rupiah dan Persentase)**

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%
NAD	11.210,44	-	11.809,24	5,34	13.150,77	11,36	17.694,60	34,55	20.779,48	17,43	24.626,59	18,51	17,44
SUMUT	73.691,23	-	79.001,99	7,21	86.501,67	9,49	102.036,81	17,96	125.679,69	23,17	146.324,58	16,43	14,85
SUMBAR	14.097,43	-	13.469,41	-4,45	12.709,42	-5,64	14.478,13	13,92	16.007,29	10,56	16.747,56	4,62	3,80
RIAU	94.631,93	-	99.997,36	5,67	115.463,96	15,47	142.800,19	23,68	164.996,55	15,54	176.056,32	6,70	13,41
JAMBI	35.907,31	-	37.476,06	4,37	40.041,67	6,85	49.477,29	23,56	57.969,74	17,16	65.866,57	13,62	13,11
SUMSEL	19.523,90	-	19.746,20	1,14	21.520,60	8,99	24.248,60	12,68	26.168,85	7,92	28.942,74	10,60	8,26
BENGKULU	2.679,21	-	2.823,69	5,39	3.046,00	7,87	3.951,75	29,74	4.377,71	10,78	5.290,25	20,85	14,93
LAMPUNG	19.949,61	-	21.054,62	5,54	21.518,31	2,20	23.396,11	8,73	27.966,33	19,53	28.726,34	2,72	7,74
BABEL	4.921,81	-	4.714,87	-4,20	5.577,34	18,29	6.215,31	11,44	7.285,85	17,22	8.382,74	15,06	11,56
KEPRI	1.636,01	-	1.768,20	8,08	1.773,28	0,29	1.962,92	10,69	2.126,43	8,33	2.102,88	-1,11	5,26
Rata-rata Sumatera		-		3,41		7,516		18,69		14,77		10,80	11,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5.3 dapat disimpulkan analisis per provinsi dengan perkembangan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 yaitu ada provinsi Kep.Riau 8,08%, Sumatera Utara 7,21%, Riau 5,67%, Lampung 5,54%, Bengkulu 5,39%, Aceh 5,34%, Jambi 4,37% perkembangan tersebut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 3,41%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu peningkatan volume panen yang signifikan, perbaikan harga komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao. Beberapa provinsi yang di bawah rata-rata perkembangan Sumatera yaitu provinsi Sumatera Selatan 1,14%, dan provinsi yang mengalami penurunan ada provinsi Kep.Bangka Belitung -4,20% dan Sumatera Barat 4,45%. Penurunan tersebut disebabkan oleh harga komoditas karet atau sawit yang rendah secara global ditahun tersebut serta terjadinya penuaan tanaman dampak kebakaran yang mengganggu produksi di akhir tahun.

Perkembangan pada tahun 2020 dengan PDRB tertinggi di provinsi Kep.Bangka Belitung 18,29%, Riau 15,47%, Aceh 11,36%, Sumatera Utara 9,49%, Sumatera Selatan 8,99%, Bengkulu 7,87% perkembangan tersebut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 7,51%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh dorongan lonjakan harga komoditas CPO (minyak kelapa sawit) global, pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan permintaan minyak nabati, menaikkan harga jual secara signifikan dan mendorong nilai PDRB. Beberapa provinsi dengan perkembangan di bawah rata-rata Sumatera yaitu Jambi 6,85%, Lampung 2,20%, Kep.Riau 0,29% dan provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan sebesar -5,64%. Penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan harga karet (yang dominan di Sumatera Barat) atau gangguan panen sawit yang parah di wilayah dan gangguan transportasi/ekspor yang lebih ketat dibandingkan provinsi lain. Beberapa provinsi mengalami perkembangan tertinggi di tahun 2021 yaitu Aceh 34,55%, Bengkulu 29,74%, Riau 23,68%, Jambi 23,56% perkembangan tersebut lebih kecil dari perkembangan rata-rata Sumatera sebesar 18,69%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu di mana PDRB Perkebunan mengalami

lonjakan terbesar (rata-rata 18,69%), hal ini didorong oleh harga CPO yang mencapai rekor tertinggi di pasar global sebagai dampak dari ketegangan geopolitik, cuaca buruk di negara produsen lain, dan pemulihan permintaan industri. Variasi Kenaikan seperti provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Riau menikmati persentase kenaikan yang sangat tinggi karena provinsi tersebut adalah sentra produksi CPO/Karet dan berhasil menjaga volume produksi tetap stabil. Beberapa provinsi dengan perkembangan dibawah rata-rata Sumatera yaitu Sumatera Utara 17,96%, Sumatera Barat 13,92%, Sumatera Selatan 12,68% Kep.Bangka Belitung 11,44%, Kep.Riau 10,69%, Lampung 8,73%, perkembangan dengan kenaikan terendah seperti Lampung (8,73%), masih mencatat pertumbuhan yang sangat baik, menunjukkan bahwa faktor harga global mendominasi perkembangan PDRB sub-sektor ini.

Perkembangan PDRB sub sektor perkebunan tahun 2022 dengan perkembangan provinsi tertinggi yaitu Sumatera Utara 23,17%, Lampung 19,53%, Aceh 17,43%, Kep.Bangka Belitung 17,22%, Jambi 17,16% dan Riau 15,54% perkembangan berikut lebih kecil dari perkembangan rata-rata Sumatera sebesar 14,77%. Perkembangan yang tinggi dengan cukup Kuat namun melambat Kenaikan rata-rata (14,77%) masih tinggi tetapi lebih kecil dari tahun 2021, menunjukkan penyesuaian harga CPO dari rekor tertingginya. Beberapa provinsi dengan perkembangan di bawah rata-rata yaitu Bengkulu 10,78%, Sumatera Barat 10,56%, Kep.Riau 8,33%, Sumatera Selatan 7,92%. Penurunan perkembangan tersebut disebabkan oleh gangguan kebijakan pada tahun 2022 Indonesia menerapkan larangan ekspor CPO yang mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Perkembangan tahun 2023 dengan provinsi perkembangan tertinggi yaitu Bengkulu 20,85%, Aceh 18,51%, Sumatera Utara 16,43%, Kep.Bangka Belitung 15,06%, Jambi 13,62%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan volume panen dan efisiensi biaya yang berhasil dilakukan oleh petani di wilayah tersebut, ditengah harga yang mulai stabil. Beberapa perkembangan provinsi di bawah rata-rata Sumatera yaitu Riau 6,70%, Sumatera Barat 4,62%, Lampung 2,72% dan provinsi Kep.Riau mengalami penurunan perkembangan sebesar -1,11%. Penurunan PDRB di Kep. Riau (-1,11%) di tengah pertumbuhan rata-rata

yang positif menunjukkan adanya gangguan lokal, seperti gagal panen dan konversi lahan, bahkan penurunan kinerja ekspor yang signifikan dari provinsi tersebut.

Secara umum perkembangan PDRB sub sektor perkebunan selama 6 tahun dengan rata-rata perkembangan tertinggi yaitu provinsi Aceh sebesar 17,44 % lebih kecil dari rata-rata Sumatera yaitu 11,04%, dan rata-rata perkembangan terendah yaitu 3,80% Sumatera Barat. Perkembangan PDRB perkebunan secara umum meningkat dan beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Kep.Bangka Belitung dan Kep.Riau yang mengalami penurunan secara tidak beruntun. Meningkatnya perkembangan PDRB Perkebunan dapat berasal dari ekspansi areal tanam (pembukaan lahan baru) dan/atau peningkatan produktivitas per hektar (misalnya melalui penggunaan bibit unggul, pupuk, atau program peremajaan), meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, sektor perkebunan juga menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan (deforestasi, emisi gas rumah kaca) dan sosial (konflik lahan), dengan perkembangan yang begitu besar, ada peluang besar untuk mengembangkan industri hilir dari produk perkebunan misalnya, turunan sawit untuk oleokimia, biomassa, ini akan menambah nilai tambah dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan tren penurunan pada tanaman pangan dan stabilitas/sedikit penurunan pada hortikultura, sektor perkebunan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, ini menandakan adanya pergeseran fokus dan investasi di sektor pertanian dari pangan ke komoditas ekspor. Secara keseluruhan, sektor perkebunan di Pulau Sumatera adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sangat penting, ditunjukkan oleh peningkatan PDRB ADHB yang signifikan di banyak provinsi. Potensi ekonomi yang besar ini harus dikelola dengan bijak, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

5.1.4 Perkembangan PDRB Sub Sektor Peternakan

Perkembangan sub sektor Peternakan untuk 10 provinsi di pulau Sumatera selama periode tahun 2018-2023, yang memberikan gambaran perkembangan sub sektor perkebunan terhadap perekonomian masing-masing provinsi selama 6 tahun. Secara umum perkembangan PDRB ADHB Peternakan di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan pola yang relatif stabil atau sedikit berfluktuasi selama 6 tahun, tidak ada provinsi yang menunjukkan lonjakan atau penurunan drastis yang konsisten secara signifikan, ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki pertumbuhan yang lebih lambat atau stabil dibandingkan sektor lain seperti perkebunan, namun tetap menjadi bagian penting dari struktur ekonomi daerah. Stabilitas ini bisa mencerminkan pasokan dan permintaan yang seimbang, atau tingkat investasi yang konsisten dalam subsektor ini. Rata-rata perkembangan PDRB sub sektor Peternakan di seluruh provinsi yang diamati selama periode 2018-2023 mulai dari terendah 5,29% yaitu provinsi Riau dan tertinggi 9,34% Kep.Riau, ini menunjukkan bahwa perkembangan peternakan cenderung lebih kecil dibandingkan subsektor pertanian lain seperti tanaman pangan atau perkebunan, namun tetap signifikan dalam konteks tertentu dan bervariasi antar provinsi. Analisis lebih lanjut dapat dilihat tabel 5.4.

Tabel 5.4 Data PDRB ADHB dan Perkembangan Peternakan Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023
(Milliar Rupiah dan Persentase)

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%
NAD	6.904,90	-	7.536,63	9,15	7.685,07	1,97	8.169,90	6,31	9.224,74	12,91	10.036,46	8,80	7,83
SUMUT	13.931,70	-	15.217,31	9,23	15.187,09	-0,20	16.206,25	6,71	17.289,65	6,69	18.623,27	7,71	6,03
SUMBAR	3.917,65	-	4.273,64	9,09	4.386,34	2,64	4.813,01	9,73	5.477,58	13,81	5.935,75	8,36	8,72
RIAU	5.777,29	-	6.011,66	4,06	6.002,02	-0,16	6.575,38	9,55	7.216,91	9,76	7.449,50	3,22	5,29
JAMBI	2.661,26	-	2.892,83	8,70	2.900,11	0,25	3.027,90	4,41	3.425,34	13,13	3.662,92	6,94	6,68
SUMSEL	5.942,50	-	6.622,90	11,45	6.657,90	0,53	7.038,50	5,72	7.476,87	6,23	7.958,89	6,45	6,07
BENGKULU	2.681,81	-	2.928,19	9,19	3.036,81	3,71	3.213,01	5,80	3.553,19	10,59	3.703,78	4,24	6,70
LAMPUNG	14.164,75	-	15.696,02	10,81	15.823,58	0,81	17.159,46	8,44	19.517,30	13,74	21.962,13	12,53	9,27
BABEL	832,56	-	877,25	5,37	870,34	-0,79	973,86	11,89	1.079,38	10,84	1.157,57	7,24	6,91
KEPRI	864,68	-	1.011,73	17,01	1.030,11	1,82	1.227,70	19,18	1.371,75	11,73	1.330,12	-3,03	9,34
Rata-rata Sumatera		-		9,40		1,058		8,774		10,94		6,25	7,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5.4 dapat disimpulkan analisis per provinsi dengan perkembangan yang cukup tinggi pada tahun 2019 yaitu provinsi Kep.Riau 17,01%, Sumatera Selatan 11,45%, Lampung 10,81% perkembangan berikut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera tahun 2019 sebesar 9,40%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan oleh permintaan terhadap produk hewani seperti daging, telur, susu dan jasa pertanian misalnya pengolahan lahan, kenaikan tertinggi Kepulauan Riau, sebagai wilayah dengan basis populasi besar (Batam, Bintan) dan aktivitas perdagangan/wisata tinggi, memiliki permintaan daging/telur yang sangat besar, kenaikan 17,01% mencerminkan peningkatan investasi dan volume produksi ternak potong untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang besar. Provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera yaitu Sumatera Utara 9,23%, Bengkulu 9,19%, Aceh 9,15%, Sumatera Barat 9,09%, Jambi 8,70%, Kep.Bangka Belitung 5,37%, Riau 4,06%. Kenaikan Rendah (Riau, Kep. Bangka Belitung) kedua provinsi ini berfokus pada komoditas perkebunan/pertambangan. Kenaikan yang lebih rendah disebabkan oleh harga pakan yang meningkat atau volume permintaan lokal yang tidak setinggi provinsi lain. Perkembangan pada tahun 2020 provinsi dengan perkembangan tertinggi yaitu 3,71% di provinsi Bengkulu, Sumatera Barat 2,64%, Aceh 1,97%, Kep.Riau 1,82% perkembangan berikut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 1,05%, perkembangan yang tinggi tersebut disebabkan karena permintaan pangan lokal tetap stabil atau harga pakan relatif lebih murah. Provinsi yang di bawah rata-rata perkembangan Sumatera yaitu Lampung 0,81%, Sumatera Selatan 0,53%, Jambi 0,25% dan beberapa provinsi yang mengalami penurunan perkembangan PDRB yaitu Kep.Bangka Belitung -0,79%, Sumatera Utara -0,20% dan Riau 0,16%. Penurunan (Kep. Bangka Belitung Sumatera Utara) menunjukkan adanya penurunan harga jual produk ternak atau tingginya biaya operasional (pakan ternak) yang tidak tertutup harga jual, sehingga PDRB-nya berkontraksi.

Perkembangan pada tahun 2021 provinsi dengan persentase tertinggi yaitu Kep.Riau 19,18%, Kep.Bangka Belitung 11,89%, Sumatera Barat 9,73%, Riau 9,55% perkembangan tersebut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 8,77%, perkembangan yang tinggi tersebut menunjukkan lonjakan

permintaan yang sangat besar dari pasar Batam/Bintan yang mulai dibuka kembali, atau adanya investasi besar dalam peternakan di wilayah tersebut untuk menggantikan pasokan dari luar pulau. Beberapa provinsi dengan rata-rata di bawah Sumatera yaitu Lampung 8,44%, Sumatera Utara 6,71%, Aceh 6,31%, Bengkulu 5,80%, Sumatera Selatan 5,72%, dan Jambi 4,41%. Kenaikan Rendah (Jambi, Sumatera Selatan): Pertumbuhan yang lebih lambat bisa mencerminkan kekurangan pasokan bibit ternak dan masalah pakan setelah disrupsi tahun 2020, sehingga volume produksi belum sepenuhnya pulih. Perkembangan pada tahun 2022 dengan persentase tertinggi di provinsi Sumatera Barat 13,81%, Lampung 13,74%, Jambi 13,13%, dan Aceh 12,91% perkembangan tersebut lebih kecil dari rata-rata perkembangan Sumatera sebesar 10,94%, Kenaikan Tertinggi (Sumatera Barat, Lampung, Jambi): Kenaikan yang tinggi di provinsi-provinsi ini menunjukkan adanya peningkatan populasi ternak dan program pemerintah yang berhasil dalam mendukung peternak di wilayah tersebut, yang membuat volume produksi meningkat. Provinsi dengan rata-rata di bawah Sumatera yaitu Kep.Bangka Belitung 10,84%, Bengkulu 10,59%, Riau 9,76%, Sumatera Utara 6,69%, Sumatera Selatan 6,23%. Perkembangan dengan Kenaikan Rendah (Sumatera Utara, Sumatera Selatan): Pertumbuhan yang lebih rendah di provinsi besar ini disebabkan oleh tekanan biaya pakan yang sangat tinggi (inflasi biaya) yang tidak sebanding dengan kenaikan harga jual produk ternak.

Perkembangan pada tahun 2023 dengan provinsi tertinggi ialah Lampung 12,53%, Aceh 8,80%, Sumatera Barat 8,36%, Sumatera Utara 7,71%, Jambi 6,94%, Sumatera Selatan 6,45%, perkembangan yang kuat (Lampung, Aceh): Provinsi ini berhasil mempertahankan dan meningkatkan volume produksi mereka di tengah tantangan biaya, sehingga PDRB-nya tetap tinggi. Penurunan (Kep. Riau): Penurunan -1,11% di Kep. Riau sangat mungkin disebabkan oleh normalisasi pasokan dari luar daerah atau penurunan permintaan (misalnya penurunan pariwisata) yang bersifat sementara, sehingga kinerja sub-sektor ini sedikit berkontraksi dari tahun sebelumnya.

Secara umum rata-rata persentase perkembangan tertinggi selama 6 tahun yaitu provinsi Kep.Riau 9,34% lebih kecil dari rata-rata Sumatera sebesar 7,28%.

Provinsi dengan rata-rata perkembangan terendah yaitu 5,29% lebih besar dari rata-rata Sumatera 7,28%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sub sektor ini didukung oleh kegiatan peternakan skala kecil dan menengah dan penting dalam struktur ekonomi, Perkembangan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong peningkatan permintaan akan hewani. Beberapa penghambat perkembangan PDRB Peternakan seperti lahan dan lingkungan yang terbatas terutama di provinsi yang dominasi perkebunan atau industri, keterbatasan modal untuk investasi pada teknologi modern, perbaikan bibit dan pakan yang berkualitas, wabah penyakit juga menyebabkan kerugian besar dan menghambat perkembangan. Beberapa peluang yang didapatkan seperti peningkatan permintaan protein hewani seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi menjadi peluang besar.

Pengembangan produk olahan peternakan (hilirisasi) juga dapat meningkatkan nilai tambah, di banyak provinsi, peternakan rakyat (skala kecil) masih memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan lokal dan memberikan pendapatan bagi rumah tangga petani. Kebijakan yang mendukung peternakan rakyat ini akan krusial untuk keberlanjutan sektor ini. Bagi provinsi yang dominan perkebunan, peternakan dapat menjadi bentuk diversifikasi lahan dan usaha, terutama peternakan sapi yang terintegrasi dengan kelapa sawit (untuk pemanfaatan limbah dan pakan), meskipun perkembangan tidak sebesar sub sektor perkebunan itu sendiri. Secara keseluruhan, sub sektor peternakan di Pulau Sumatera menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil atau sedikit berfluktuasi, mencerminkan perannya yang krusial dalam menyediakan kebutuhan pangan hewani meskipun perkembangan relatif lebih kecil dibandingkan sub sektor pertanian lainnya. Provinsi seperti Lampung menonjol sebagai sentra produksi peternakan, sementara provinsi lain lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan lokal atau memiliki tantangan dalam pengembangan skala besar. PDRB sub sektor Peternakan umumnya sebanding atau sedikit lebih rendah dari tanaman pangan dan hortikultura di beberapa provinsi, yang menunjukkan bahwa ketiganya adalah sektor tradisional yang penting. Perkembangan Perkebunan dibandingkan dengan subsektor peternakan jauh lebih kecil. Kebijakan yang mendukung produktivitas,

kesehatan ternak, dan efisiensi rantai pasok akan penting untuk masa depan sektor ini.

5.2 Kondisi Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di pulau Sumatera selama periode tahun 2018-2023 dengan data persentase kemiskinan, Jenis kondisi kemiskinan yang digambarkan dalam tabel 5.5 adalah persentase kemiskinan berdasarkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang dikenal sebagai Head Count Index (P0) atau persentase penduduk miskin. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah kemiskinan di masing-masing provinsi dan melihat perbandingan jumlah kemiskinan antar provinsi. Secara umum dapat diamati bahwa persentase penduduk miskin di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera stabil selama 6 tahun terakhir, ada fluktuasi minor di beberapa tahun seringkali terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro atau pandemi COVID-19 pada tahun 2020/2021, tren jangka panjang cenderung positif atau stagnan, yang menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan membuahkan hasil, meskipun lambat di beberapa wilayah. Rata-rata kondisi kemiskinan di seluruh provinsi yang diamati selama periode 2018-2023 sebesar 1,18% yaitu provinsi Kep.Bangka Belitung dan kondisi kemiskinan tertinggi yaitu Sumatera Utara sebesar 21,96% ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam tingkat kemiskinan antar provinsi di Sumatera. Analisis lebih lanjut dapat dilihat tabel 5.5.

Tabel 5.5 Data Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Pada Tahun 2018-2023 (Jiwa dan Persentase/%)

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	%
NAD	831,5	14,05	809,76	14,03	814,91	13,96	834,24	13,76	806,82	14,06	806,75	14,23	14,01
SUMUT	1.291,99	21,83	1.260,50	21,84	1.283,29	21,98	1.343,86	22,16	1.268,19	22,10	1.239,71	21,87	21,96
SUMBAR	353,24	5,97	343,09	0,06	344,23	5,90	370,67	6,11	335,21	5,84	340,37	6,00	4,98
RIAU	494,26	8,35	483,92	8,38	483,39	8,28	500,81	8,26	485,03	8,45	485,66	8,57	8,38
JAMBI	281,47	4,76	273,37	4,74	277,8	4,76	293,86	4,85	279,37	4,87	280,68	4,95	4,82
SUMSEL	1.076,40	18,18	1.067,16	18,49	1.081,58	18,53	1.113,76	18,37	1.044,69	18,21	1.045,68	18,45	18,37
BENGKULU	303,55	5,13	298	5,16	302,58	5,18	306	5,05	297,23	5,18	288,46	5,09	5,13
LAMPUNG	1.091,60	18,44	1.041,48	18,04	1.049,32	17,98	1.083,93	17,87	1.002,41	17,47	970,67	17,12	17,82
BABEL	69,93	1,18	67,37	1,17	68,39	1,17	72,71	1,20	66,78	1,16	68,69	1,21	1,18
KEPRI	125,36	2,12	127,76	2,21	131,97	2,26	144,46	2,38	151,68	2,64	142,5	2,51	2,36
Total	5.919,30		5.772,41		5.837,46		6.064,30		5.737,41		5.669,17		9,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat disimpulkan analisis per provinsi dengan kondisi kemiskinan yang tertinggi pada tahun 2018 yaitu ada Sumatera utara sebesar 21,83%, Lampung 18,44%, Sumatera Selatan 18,18%, Aceh 14,03% dan beberapa provinsi yang dibawah rata-rata kemiskinan di Sumatera sebesar 9,90% yaitu provinsi Riau 8,34%, Sumatera Barat 5,97%, Bengkulu 5,13%, Jambi 4,76%, Kep.Riau 2,12%, Kep.Bangka Belitung 1,18%. Pada tahun 2019 provinsi dengan persentase yang tinggi di provinsi Sumatera Utara sebesar 21,84%, Sumatera Selatan 18,49%, Lampung 18,04%, Aceh 14,03%, beberapa provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera seperti Riau 8,38%, Bengkulu 5,16%, Jambi 4,74%, Kep.Riau 2,21%, Bangka Belitung 1,17%, Sumatera Barat 0,06%. Tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi stabil sebelum pandemi COVID-19, stabilitas harga komoditas (kelapa sawit, migas) dan investasi yang berkelanjutan menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah. Pada tahun 2020 provinsi dengan kondisi persentase kemiskinan yang tinggi di provinsi Sumatera Utara 21,98%, Sumatera Selatan 18,53%, Lampung 17,98%, Aceh 13,96%, dan beberapa provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera seperti provinsi Riau 8,28%, Sumatera Barat 5,90%, Bengkulu 5,18%, Jambi 4,76%, Kep.Riau 2,26%, Kep.Bangka Belitung 1,17%. Tahun 2020 terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan Pembatasan sosial, kontraksi ekonomi, dan PHK sehingga meningkatnya kemiskinan yang hampir semua provinsi mengalami sedikit peningkatan persentase kemiskinan (terlihat di Sumatera Utara, Sumatera Selatan) karena hilangnya pekerjaan, terutama di sektor informal dan jasa.

Pada tahun 2021 provinsi dengan persentase kemiskinan yang tinggi di provinsi Sumatera Utara 22,16%, Sumatera Selatan 18,37%, Lampung 17,87%, Aceh 13,76%, dan provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera yaitu Riau 8,26%, Sumatera Barat 6,11%, Bengkulu 5,05%, Jambi 4,85%, Kep.Riau 2,38%, Kep.Bangka Belitung 1,20%. Pada tahun ini pemulihan ekonomi yang lambat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemiskinan di provinsi tinggi berlanjut atau sedikit meningkat karena pemulihan sektor informal dan perdesaan yang lebih lambat. Provinsi rendah mampu menahan dampak berkat sektor formal/komoditas yang mulai pulih. Pada tahun 2022 provinsi dengan

persentase kemiskinan yang tinggi di provinsi Sumatera Utara 22,10%, Sumatera Selatan 18,21%, Lampung 17,47%, Aceh 14,06% dan provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera yaitu Riau 8,48%, Sumatera Barat 5,84%, Bengkulu 5,18%, Jambi 4,87%, Kep.Riau 2,64%, Kep.Bangka Belitung 1,16%. Pemulihan pasca-pandemi dengan kenaikan harga komoditas global, penurunan kemiskinan di provinsi tinggi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung) mulai menunjukkan penurunan persentase karena pemulihan lapangan kerja dan peningkatan harga komoditas yang menguntungkan petani. Pada tahun 2023 provinsi dengan persentase kemiskinan yang tinggi di provinsi Sumatera Utara 21,87%, Sumatera Selatan 18,45%, Lampung 17,12%, Aceh 14,23%, dan beberapa provinsi yang dibawah rata-rata Sumatera seperti Riau 8,57%, Sumatera Barat 6%, Bengkulu 5,09%, Jambi 4,95%, Kep.Riau 2,51%, Kep.Bangka Belitung 1,21%. Kenaikan harga pangan dan inflasi tren penurunan kemiskinan berlanjut, namun inflasi, terutama harga pangan, bisa memicu kenaikan Garis Kemiskinan (GK), yang bisa menjelaskan mengapa beberapa persentase provinsi (Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi) menunjukkan sedikit peningkatan atau stabil.

Secara umum dilihat dari tabel 5.5 rata-rata kondisi kemiskinan yang tertinggi dari 6 tahun yaitu provinsi Sumatera Utara sebesar 21,96% lebih kecil dari rata-rata Sumatera yaitu 9,90%, provinsi dengan rata-rata terendah persentase kemiskinan dalam 6 tahun yaitu Kep.Bangka Belitung sebesar 1,18%. Semua provinsi menunjukkan peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021, yang sangat mungkin merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan PHK. Provinsi dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang lebih baik cenderung menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan, karena ini memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan masyarakat, membuka peluang ekonomi. Untuk provinsi dengan persentase kemiskinan yang persisten tinggi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung tantangan bersifat struktural, melibatkan masalah geografis, kualitas SDM, atau kurangnya diversifikasi ekonomi, di perlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan komprehensif. Penurunan kemiskinan yang terjadi menunjukkan bahwa program-program pengurangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah

(pusat maupun daerah) memiliki dampak, namun keberlanjutan dan target sasaran program ini sangat penting untuk mencapai penurunan yang lebih drastis dan merata.

5.3 Pengaruh PDRB Sub Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan

Untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu pengaruh setiap PDRB sub sektor pertanian terhadap kemiskinan di Sumatera selama periode 2018-2023, maka dilakukan pengujian data untuk melihat apakah memenuhi persyaratan dan lolos untuk pengujian parametrik maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut:

1) Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah FEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. (Basuki & Yuliadi, 2014:183) (Napitupulu Et al., 2021:120)

1. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat di tabel 5.6.

Tabel 5.6 Hasil Uji Multikolinieritas

	TP	H	PK	PT
TP	1.000	0.627	0.238	0.485
H	0.627	1.000	0.531	0.426
PK	0.238	0.531	1.000	0.148
PT	0.485	0.426	0.148	1.000

Sumber: Hasil olahan Data Eviews versi 12, 2025

Berdasarkan tabel 5.6 bahwa nilai centered VIF dari masing-masing variabel tidak terdapat yang lebih dari 10 (*VIF Variabel Independen < 10.00*), artinya semua variabel bebas tidak terindikasi gejala multikolinieritas atau uji multikolinieritas sudah terpenuhi atau lolos.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat di tabel 5.7.

Tabel 5.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Panel Least Squares Date: 09/17/25 Time: 14:09 Sample: 2018 2023 Periods included: 6 Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.09175	19.96512	0.856081	0.3964
TP	-0.000813	0.001660	-0.489909	0.6265
H	0.001050	0.002360	0.445045	0.6584
PK	-6.98E-05	0.000123	-0.567811	0.5729
PT	-3.03E-05	0.000227	-0.133335	0.8945

Sumber: Hasil olahan Data Eviews versi 12, 2025

- Jika nilai prob nya $< 0,05$ maka terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian.
- Jika nilai prob nya $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 5.7 menunjukkan bahwa Variabel TP (Tanaman pangan), H (Hortikultura), PK (Perkebunan), PT (Peternakan) tidak terjadi heteroskedastisitas hal ini dibuktikan memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

2) Langkah Estimasi Model

1. Uji Chow

Berdasarkan hasil uji chow dapat dilihat tabel 5.8.

Tabel 5.8 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1020.129406	(9,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	318.075942	9	0.0000

Sumber: Hasil olahan Data Eviews versi 12, 2025

Berdasarkan tabel 5.8 nilai prob 0.0000 $< 0,05$, maka yang terpilih adalah model FEM, selanjutnya akan dilakukan uji Hausman jika model yang terpilih ialah FEM.

2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji Hausman dapat dilihat tabel 5.9.

Tabel 5.9 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.749579	4	0.0002

Sumber: Hasil olahan Data Eviews versi 12, 2025

Berdasarkan tabel 5.9 hasil uji Hausman Nilai prob 0.002 > 0,05 maka yang terpilih FEM, maka tidak perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier, karena Uji LM digunakan untuk membandingkan model CEM dan REM.

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman maka model yang terpilih dalam penelitian ini adalah FEM.

3) Persamaan Regresi FEM

Persamaan Regresi FEM dapat dilihat di tabel 5.10

Tabel 5.10 Hasil Regresi Model FEM

Dependent Variable: K
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/17/25 Time: 12:50
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	750.3547	36.90900	20.32986	0.0000
TP	-0.012303	0.003068	-4.010086	0.0002
H	-0.003263	0.004362	-0.748064	0.4582
PK	-6.85E-06	0.000227	-0.030126	0.9761
PT	-7.95E-05	0.000420	-0.189376	0.8506

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998448	Mean dependent var	583.3342
Adjusted R-squared	0.998009	S.D. dependent var	414.8721
S.E. of regression	18.51142	Akaike info criterion	8.875616
Sum squared resid	15762.94	Schwarz criterion	9.364296
Log likelihood	-252.2685	Hannan-Quinn criter.	9.066766
F-statistic	2276.057	Durbin-Watson stat	1.673237
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olahan Data Eviews versi 12, 2025

Berdasarkan tabel 5.10 hasil estimasi REM maka diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu PDRB sub sektor tanaman pangan, PDRB sub sektor hortikultura, PDRB sub sektor perkebunan dan PDRB sub sektor peternakan terhadap jumlah penduduk miskin setiap provinsi di Sumatera dapat dijelaskan melalui model berikut:

$$K_{it} = \beta_0 - \beta_1 TP_{it} - \beta_2 H_{it} - \beta_3 PK_{it} - \beta_4 PT_{it} + E_{it}$$

$$K_{it} = 750.3547 - 0.012303 TP_{it} - 0,003263 H_{it} - 6.852506 PK_{it} - 7.950932 PT_{it} + E_{it}$$

Berdasarkan hasil Persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 750.3547 yang menjelaskan bahwa nilai rata-rata jumlah kemiskinan selama periode 2018-2023 sebesar 750.3547 jiwa dengan mengasumsikan variabel PDRB sub sektor Tanaman pangan, PDRB sub sektor Hortikultura, PDRB sub sektor Perkebunan dan PDRB sub sektor Peternakan tidak berubah/tetap.
2. Nilai Koefisien PDRB Tanaman Pangan bernilai negatif (-) sebesar 0.012303 maka diartikan kenaikan satu rupiah pada PDRB Tanaman pangan maka jumlah penduduk miskin diperkirakan akan menurun sebanyak 0.012303 Jiwa, dikalikan dengan satu ribu rupiah maka 12 jiwa, dengan nilai kecil yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang artinya kenaikan PDRB sub sektor tanaman pangan dapat membantu mengurangi kemiskinan.
3. Nilai Koefisien PDRB sub sektor Hortikultura bernilai negatif (-) sebesar Rp 0,003263 maka diartikan kenaikan satu rupiah PDRB sub sektor hortikultura akan menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 0,003263 dikalikan dengan satu rupiah maka 3 jiwa
4. Nilai Koefisien PDRB sub sektor Perkebunan bernilai negatif (-) sebesar Rp 6.852506 maka diartikan setiap kenaikan satu rupiah PDRB sub sektor perkebunan akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 6.852506 dikalikan satu ribu rupiah maka 7 jiwa.
5. Nilai Koefisien PDRB sub sektor Peternakan bernilai negatif (-) sebesar Rp 7.950932 maka diartikan setiap kenaikan satu rupiah PDRB sub sektor

peternakan menyebabkan jumlah kemiskinan sebesar 7.950932 dikalikan satu ribu rupiah maka 8 jiwa.

4) Uji Parameter Regresi

1. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil tabel 5.10 menunjukkan hasil uji t statistik, yaitu untuk melihat pengaruh secara parsial pada variabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ maka $60-2= 58$, maka nilai t tabel sebesar 2.00171. Adapun penjelasan yaitu sebagai berikut:

- a) Hasil uji t pada PDRB sub sektor Tanaman Pangan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-4.010086 < \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 2,00171$ dan nilai prob $0,0002 > 0,05$ artinya PDRB sub sektor Tanaman Pangan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera
- b) PDRB sub sektor Hortikultura memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0.748064 > t \text{ tabel yaitu } 2,00171$ dan nilai prob $0.4582 < 0.05$ maka ditarik kesimpulan bahwa PDRB sub sektor Hortikultura tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera
- c) PDRB sub sektor Perkebunan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0.030126 > t \text{ tabel } 2,00171$ dan nilai prob $0.9761 < 0.05$ artinya maka ditarik kesimpulan bahwa PDRB sub sektor Perkebunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera
- d) PDRB sub sektor Peternakan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0.189376 > t \text{ tabel } 2,00171$ dan nilai prob sebesar $0.8506 < 0.05$ maka ditarik kesimpulan bahwa PDRB sub sektor Peternakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera

2. Uji F (Overall)

Berdasarkan hasil olahan data tabel 5.10, uji f dengan nilai prob F-statistik (*p-value* F statistik) PDRB sub sektor Tanam pangan, PDRB sub sektor Hortukutura, PDRB sub sektor Perkebunan, PDRB sub sektor Peternakan $0.000000 < 0,05$, hal ini menjelaskan bahwa variabel independen secara

simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan dalam penelitian ini ialah nilai Adjusted R-square karena menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil output FEM tabel 5.10 nilai Adjusted R-square sebesar 0,998009 atau 99,80%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDRB sub sektor Tanam pangan, PDRB sub sektor Hortukutura, PDRB sub sektor Perkebunan, dan PDRB sub sektor Peternakan mampu menjelaskan variabel Kemiskinan di Wilayah Sumatera sebesar 99,80%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.4 Analisis Ekonomi

5.4.1 Pengaruh PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap Kemiskinan

PDRB sub sektor tanaman pangan mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi sumatera, yang menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik antara variabel tanam pangan (TP) dan variabel dependen kemiskinan (K), artinya, jika PDRB tanam pangan meningkat, variabel kemiskinan akan cenderung menurun, dan sebaliknya. Nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0002 lebih kecil dari ambang batas signifikan umum (0.05 atau 5%), ini berarti bahwa variabel tanam pangan (TP) secara statistik signifikan mempengaruhi variabel dependen kemiskinan pada tingkat kepercayaan 100%.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krisnawati, E., Suman, A., & Saputra, P. M. A. (2018) yang menyatakan bahwa PDRB tanam pangan berpengaruh terhadap kemiskinan. Meningkatnya PDRB subsektor tanaman pangan justru memiliki kecenderungan meningkatkan kemiskinan perdesaan, dalam pengertian yang lain nilai tambah produk pertanian tidak dinikmati oleh petani. Penelitian Martauli, E. D., Karo, S. B., Sembiring, S., & Sembiring, R. (2022) yang menyatakan bahwa PDRB tanaman pangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dalam arti bahwasannya

pendapatan daerah mampu mengurangi kemiskinan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Salqaura, S. S. (2020) dengan hasil penelitian bahwa sektor pertanian salah satu yang dibahas tanaman pangan berpengaruh positif dengan kemiskinan, dalam penelitian ini perlunya peningkatan pendidikan petani, kemandirian petani dan kemandirian agar sektor pertanian menjadi sektor utama untuk daerah pedesaan yang mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

Analisis pengaruh signifikan PDRB sub sektor tanaman pangan terhadap kemiskinan di Sumatera, dapat ditunjukkan melalui hasil uji t, dapat dianalisis dari beberapa alasan sudut pandang ekonomi yaitu, pertama kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga yaitu sektor pertanian terkhusus tanaman pangan adalah sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk miskin di Sumatera, data menunjukkan bahwa penduduk miskin tinggal di pedesaan dan bergantung hidup pada pertanian. Kedua penciptaan lapangan kerja, sektor tanaman pangan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik bagi petani, buruh tani maupun industri pengolahan hasil pertanian, sektor ini bertumbuh dan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ketiga ketahanan pangan dan stabil harga, produksi tanaman pangan yang stabil dan memadai memastikan ketersediaan pangan di daerah tersebut, ketika harga pangan stabil atau menurun, masyarakat miskin dapat mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain. Keempat PDRB dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB tanaman pangan menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ini, peningkatan tersebut sering kali berkorelasi dengan investasi, produktivitas dan pendapatan lebih tinggi dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

5.4.2 Pengaruh PDRB Sub Sektor Hortikultura Terhadap Kemiskinan

PDRB sub sektor hortikultura dengan koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif antara hortikultura (H) dan variabel dependen Kemiskinan. Artinya, jika PDRB hortikultura meningkat, variabel kemiskinan (K) akan menurun, dan sebaliknya. Nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.4582 jauh lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa variabel hortikultura (H) tidak berpengaruh signifikan secara statistik dalam memengaruhi variabel dependen kemiskinan.

Dampak dari sektor hortikultura terhadap variabel kemiskinan cukup besar dalam penelitian ini.

Penelitian Permatasari, N., Priyarsono, D. S., & Rifin, A. (2016) dengan hasil bahwa sektor pertanian berdampak negatif terhadap kemiskinan, perlunya pembangunan sektor pertanian salah satu ada hortikultura yang dijalankan pemerintah yang diikuti peningkatan sumber daya manusia. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junus, M. & Sumiratin, E. (2022) yang menyatakan bahwa PDRB hortikultura dan petani hortikultura mampu menambah pendapatan petani dan mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian Azali, R., & Harsanti, T. (2022) bahwa sub sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, maka perlunya mengembangkan usaha pertanian di sektor yang lebih produktif contoh hortikultura dengan akses mudah untuk menjangkau pasar yang luas. Beberapa alasan utama PDRB sub sektor hortikultura berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera yaitu, kedua kontribusi terhadap lapangan kerja, sub sektor hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan lainnya) merupakan sektor padat karya, proses budidaya, mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen membutuhkan banyak tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang tinggi di sektor ini sehingga pendapatan rumah tangga meningkat. Ketiga nilai ekonomi tinggi dan keberlanjutan, perbandingan dengan komoditas lain, produk hortikultura sering kali memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan permintaan yang stabil, baik dari pasar domestik maupun internasional yang mampu memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Keempat pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal, Sumatera memiliki kondisi geografis dan iklim yang cocok untuk budidaya hortikultura.

5.4.3 Pengaruh PDRB Sub Sektor Perkebunan Terhadap Kemiskinan

PDRB sub sektor perkebunan dengan koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif antara perkebunan (PK) dan Kemiskinan, peningkatan PDRB perkebunan cenderung dapat menurunkan variabel Kemiskinan. Nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.9161 lebih besar dari 0.05 berarti bahwa variabel perkebunan (PK) tidak secara statistik signifikan dalam memengaruhi variabel dependen Kemiskinan, meskipun ada hubungan positif, efeknya tidak cukup kuat atau

konsisten untuk dianggap signifikan secara statistik. Sub sektor perkebunan menunjukkan bahwa penting secara ekonomi kontribusinya terhadap Kemiskinan walaupun dalam konteks model ini tidak dapat dibuktikan secara statistik sebagai faktor penentu yang kuat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salqaura (2020) yang menyatakan bahwa sub sektor perkebunan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan yang berarti bahwa ketika terjadi peningkatan PDRB sub sektor Perkebunan maka kemiskinan juga ikut meningkat. Dalam penelitian Bintariningtyas, S., & Juwita, A. H. (2021) Perkebunan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas, artinya angka kemiskinan akan menurun jika hasil produksi sawit dan PDRB meningkat. Berdasarkan penelitian Niara, A., & Zulfa, A. (2019) bahwa sektor pertanian salah satu sub sektor perkebunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh Utara.

Beberapa analisis alasan mengapa PDRB sub sektor perkebunan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yaitu, pertama Sifat padat modal bukan padat karya, berbeda dengan hortikultura yang padat karya, sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet) cenderung lebih bersifat padat modal, meskipun membuka lapangan kerja, jumlah tenaga kerja yang diserap relatif lebih sedikit dibandingkan luas lahan yang diolah, terutama karena penggunaan mesin dan teknologi modern. Kedua ketergantungan pada Harga Komoditas Global, PDRB sub sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Kenaikan harga tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan upah pekerja atau pendapatan petani kecil. Seringkali, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh perusahaan besar (korporasi), bukan oleh pekerja atau petani lokal. Ketiga ketimpangan kepemilikan lahan, di sektor perkebunan, sering terjadi ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Petani kecil atau buruh tani memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ini.

5.4.4 Pengaruh PDRB Sub Sektor Peternakan Terhadap Kemiskinan

Perkembangan PDRB Sub Sektor Peternakan merupakan salah satu faktor yang dominan terhadap pengurangan jumlah Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Sumatera. Dalam uji t (Parsial) PDRB sub sektor peternakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan yang dibuktikan dengan probabilitas sebesar $0,8506 < 0,005$.

Berdasarkan Penelitian Rini, G.(2016) bahwa pendapatan hasil dari pendapatan sapi potong masih masuk kategori miskin berdasarkan bank dunia, maka belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan, M., & Nurdelila, R. (2019) yang menyatakan bahwa PDRB subsektor Peternakan secara signifikan mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi Sumatera, dan dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan PDRB Perkebunan juga signifikan terhadap kemiskinan maka kebijakan pembangunan ekonomi di Sumatera harus memprioritaskan dan mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan dan perkebunan. Penelitian Juniarsih, T. (2021) bahwa peningkatan PDRB sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan mampu meningkatkan PDRB provinsi Aceh daalam arti peningkatan sub sektor peternakan belum pasti mengurangi kemiskinan diwilayah tersebut. Beberapa analisis alasan mengapa PDRB sub sektor peternakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yaitu, pertama struktur sektor yang tidak inklusif, seperti peternakan skala besar dan modern, artinya peningkatan PDRB mungkin lebih banyak disumbang oleh peternakan komersial yang padat modal dan teknologi. Peternakan ini cenderung tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan keuntungan utamanya dinikmati oleh pemilik modal, bukan oleh buruh atau masyarakat luas. Kedua kurangnya nilai tambah (hilirisasi), PDRB peternakan di Sumatera seringkali berasal dari penjualan produk dasar (daging, telur, susu) tanpa diolah lebih lanjut, dan mengakibatkan keuntungan terbatas, nilai jual produk mentah jauh lebih rendah dari pada produk olahan (misalnya, sosis, kornet, susu kemasan). Ketiga keterbatasan modal dan teknologi, peternak kecil sering menghadapi kendala modal, teknologi, dan akses pasar, meskipun mereka berkontribusi pada

produksi, keuntungan yang mereka peroleh seringkali terbatas dan tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan secara signifikan.

5.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pembuat kebijakan dalam upaya mendorong pengurangan kemiskinan di wilayah- wilayah yang tergolong tingginya kemiskinan. Pertama, mengingat bahwa sub sektor Tanaman pangan berpengaruh signifikan dan memberikan dampak positif terhadap kemiskinan maka kebijakan pembangunan ekonomi di Sumatera harus memprioritaskan dan mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, hal yang dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan akses pasar tanaman pangan seperti memberikan subsidi pupuk, benih unggul dan alat pertanian kepada petani. Pengembangan program pelatihan, mendorong rantai pasok yang efisien untuk mengurangi biaya distribusi dan memastikan harga yang stabil bagi petani., disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sub sektor hortikultura, PDRB sub sektor perkebunan dan PDRB sub sektor peternakan tidak berpengaruh signifikan tetapi berdampak positif terhadap kemiskinan. Sub sektor dengan PDRB tinggi namun tidak signifikan memengaruhi kemiskinan (Perkebunan, Hortikultura, Peternakan) harus direformasi agar lebih inklusif.

Pemerintah perlu mendorong kemitraan yang adil antara perusahaan besar dan petani kecil masyarakat lokal, mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal agar terserap dalam pekerjaan yang lebih bernilai tinggi, mendorong skema kemitraan yang adil antara korporasi dan petani plasma untuk memastikan keuntungan PDRB yang besar terdistribusi hingga ke pekerja dan masyarakat miskin di sekitar perkebunan dan mengembangkan program pengolahan pascapanen dan berikan akses pasar yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah bagi petani kecil, bukan hanya bagi pedagang besar.